

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*);

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan; dan

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Buku

Abrianto, Bagus Oktafian, Xavier Nugraha, and Nathanael Grady. “Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Pasca-Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Development of Lawsuit for Law Violation by the Government of the Post Law Number 30 of 2014.” *NEGARA HUKUM* 11, no. 30 (2020): 50.

Aditya, Sulistiyawan. “Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum,” 2022.

Adnan, Indra Muchlis. *NEGARA HUKUM Dan DEMOKRASI*. Edited by Lukman Santoso. Revisi. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019.

Ali, Mukti. *Perbandingan Konsep Negara Hukum*. Jakarta: BIRO HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, 2020.

Anggriani, Jum. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Pert. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Atmaja, I Dewa Gede. *Filsafat Hukum ,Dimensi Tematis & Historis*. Malang: Setara Press, 2013.

Azhary. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995.

Basah, Sjachran. *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara*. Bandung: Alumni, 1985.

- . *Menelaah Lika-Liku Rancangan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Alumni, 1992.
- Basah, Sjahran. *Eksistensi Dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*. Cetakan ke. Bandung: Alumni, 2014.
- Berge, Ten. *Besturen Door de Overheid*. Deventer: W.E.J. Tjenk Willing, 1996.
- Busroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Dicey, Albert Venn. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, n.d.
- Hamidi, Jazim, and Mustafa Lutfi. *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*. Malang: Alumni, 2009.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian Dan Aplikasinya*. Cet.I. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Buku I Beb. Jakarta: Sinar Harapan, n.d.
- Kant, Immanuel. *Metaphysische Anfangsgriinde Der Rechtslehre (Azas-Azas Metafysis Dari Ilmu Hukum)*, n.d.
- Kiemas, T. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Sebagai Sumber Moralitas Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2013.
- Koesoemahatmadja, R.D.H. *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Bandung: PT. Citra Bakti Aditya, 1975.
- Mahadi. *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum*. Cet.I. Jakarta: Kencana, 2005.
- Manan, Bagir, and Kuntara Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, 1997.
- Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di*

- Indonesia*. Cet.3. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019.
- Montesquieu. *L'Esprit Des Lois*, n.d.
- Muchsan. *Beberapa Catatan Tentang Hukum Administrasi Negara Ke Peradilan Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- N, Qamar. *Negara Hukum Atau Negara Undang-Undang*. Cet.1. Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010.
- Pot, C.W van der. *Nederlandsch Bestuursrecht*. Alphen aan den Rijn, 1932.
- Purbopranoto, Kuntjoro. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi*. Bandung: Alumni, 1981.
- Saleh, Roeslan. *Penjabaran Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perundang-Undangan*. Jakarta: Aksaa Baru, 1979.
- Schmid, J.J. von. *Pemikiran Tentang Negara Dan Hukum*. Jakarta: Pembangunan, 1988.
- Seerden, René, and Frits Stroink. *Administrative Law of the European Union, Its Member States and the United States, A Comparative Analysis*,. Antwerpen-Oxford: Intersentia, 2007.
- Setiawan, R. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Alumni, 1982.
- Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Cet.I. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Cet.III. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar, 1962.

Yuswalina. *Hukum Administrasi Negara*. Edited by M Sadi Is. Malang: Setara Press, 2019.

Jurnal

Afif, Zaid. “Konsep Negara Hukum Rule of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 2, no. 5 (2018): 55–56.

Aisyah, Nur. “Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara.” *Samudra Keadilan* Vol. 11, no. No. 1 (2016): 48–49.

Akbar, Muhammad Kamil. “Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik.” *Dharmasiswa* 1, no. 1 (2020): 354.

Asimah, Dewi, Zainal Muttaqin, and Dewi Kania Sugiharti. “Implementasi Perluasan Kompetensi Ptun Dalam Mengadili Tindakan Faktual (Onrechtmatige Overheidsdaad/Ood).” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 4, no. 1 (2020): 158. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i1.531>.

Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. “NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/viewFile/4286/2363>.

BIMASAKTI, MUHAMMAD ADIGUNA. “Onrechtmatig Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan / Act Against the Law By the Government From the View Point of the Law of Government Administration.” *Jurnal Hukum Peratun* Volume 1, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.25216/peratun.122018.265-286>.

Blegur, Spyendik Bernadus. “ASAS-ASAS HUKUM UTAMA DALAM HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA.” *Jurnal Hukum Peratun* 5, no. 1 (2022): 42–52. <https://doi.org/10.25216/peratun.512022.39-56>.

- Dameria, Rini, Achmad Busro, and Dewi Hendrawati. "PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TINDAKAN MEDIS DAN PENYELESAIANNYA DI MAHKAMAH AGUNG (STUDI KASUS PERKARA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 352/PK/PDT/2010)." *DIPONEGORO LAW JOURNAL* vol 6, no. 1 (2017): 4.
- Ezra, Onma, Rodi Aprilo, Langgam Ihutan, Eric Peter Halomoan, Anandersah Sinaga, Santi Hapsari, Dewi Adikancana, and Universitas Padjadjaran. "KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM SENGKETA TANAH TERHADAP SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH" 5, no. Nomor 2 (2022): 162–63.
- Herman. "Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara Hukum." *Jurnal Komunikasi* Vol. 1, no. No. 1 (2015): 49.
- Illahi, Beni Kurnia, Abdhy Walid Siagian, Rozin Falih Alify, and Syammakh Daffa Alghazali. "Optimalisasi Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad)." *Jurnal Hukum Peratun* 6, no. 4 (2023): 38. <https://doi.org/https://doi.org/10.25216/peratun.612023.35-56>.
- Khairo, Fatria. "Urgensi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia." *Jurnal Lex Librum* Vol. 3, no. No. 2 (2017): 545.
- Putra, Hidayat Pratama. "TANTANGAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAKAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA." *Jurnal Hukum Peratun* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.25216/peratun.512022.75-94>.
- Putrijanti, Aju, Lapon T. Leonard, and Kartika Widya Utama. "Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (2018): 279. <https://doi.org/10.22146/jmh.33056>.

Salam, Syukron. “Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum Penguasa.” *Jurnal Nurani* Vol 1, no. 1 (2018): 35.

Simanjuntak, Enrico. “RESTATEMENT TENTANG YURIDIKSI PERADILAN MENGADILI PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMERINTAH (RESTATEMENT ON JUDICIAL JURISDICTION IN ADMINISTRATIVE TORT).” *Masalah-Masalah Hukum* Volume 48, no. 1 (2019).

Sudarsono, Retyo Ariyani, and Agus Abdur Rahman. “Modifikasi Hukum Oleh Mahkamah Agung Melalui Pengaturan Upaya Administratif Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018.” *Jurnal Hukum Peratun* Volume 3, no. 2 (2018): 104.

Yulistyowati, Efi, Endah Pujiastuti, and Tri Mulyani. “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 18, no. 2 (2017): 330. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v18i2.580>.

Website

Asshiddiqie, Jimly. “GAGASAN NEGARA HUKUM INDONESIA.” Accessed November 25, 2024. https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf.

Wawancara

Trisoko Sugeng Sulisty, S.H., M.Hum. selaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Semarang